

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

Ailen Safitri, Meyzi Heriyanto, dan Mariaty Ibrahim

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

Abstract: Analysis of Implementation of Accrual Based Government Accounting Standards. This study aims to analyze the readiness in the application of accounting standards based on government accruals in the District Government of Meranti Islands. The research type is quantitative, with population of unit apparatus in government of Meranti Islands Regency. Data collection techniques are questionnaires and interviews. Samples were taken as many as 80 people with purposive sampling method. Informant Research 5 people. The analytical method used is quantitative descriptive. Based on data analysis using Human Resource Indicators, Commitment, Information System and Standard Operating Procedure, it can be concluded that the Regional Government of Meranti Islands Regency is ready to implement the implementation of Government Regulation No. 71 of 2010 on accounting standard of government based on full accrual, but still lack of human resources Which background accounting, especially in the financial section which is also one of the indicators in the readiness of the implementation of PP No. 71 of 2010. Lack of bimtek and training on PP No. 71 Year 2010 is one of the existing human resource constraints are not too understand about the accrual-based accounting is .

Keywords: accounting standards , basic accrual, commitment

Abstrak: Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. Jenis penelitian adalah kuantitatif, dengan populasi aparat satuan kerja dalam pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. Teknik pengumpulan data adalah kuesioner dan wawancara. Sampel diambil sebanyak 80 orang dengan metode purposive sampling. Informan Penelitian 5 orang. Metode analisis digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Berdasarkan analisis data dengan menggunakan indikator Sumber Daya Manusia, Komitmen, Sistem Informasi dan Standar Operasional Prosedur dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah siap untuk melaksanakan Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual penuh, namun masih kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang akuntansi khususnya pada bagian keuangan yang juga merupakan salah satu indikator dalam kesiapan penerapan PP No 71 Tahun 2010. Kurangnya bimtek dan pelatihan mengenai PP No 71 Tahun 2010 merupakan salah satu kendala sumber daya manusia yang ada belum terlalu memahami mengenai akuntansi berbasis akrual tersebut.

Kata kunci: standar akuntansi , akrual basic, komitmen

PENDAHULUAN

Salah satu misi pemerintahan Indonesia saat ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel mendorong pemerintah untuk ter-

us berupaya memperbaiki sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi menjadi isu yang sangat penting di era reformasi saat ini untuk menciptakan *good government governance*.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang SAP

Berbasis AkruaI maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan telah mempunyai landasan hukum, sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan menjadi acuan, patokan serta standar untuk diterapkan dalam lingkup pemerintahan sehingga menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah Otonomi Kabupaten/Kota maupun Propinsi dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akruaI pada pemerintah daerahnya.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akruaI menjadi basis akruaI penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Meranti sebagai pengguna anggaran juga wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.

Terkait dengan penerapan basis akruaI sendiri, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akruaI, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan basis akruaI. Persiapan tersebut dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti agar siap dan dapat mengatasi berbagai kendala dalam penerapan basis akruaI.

Beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akruaI (Simanjuntak, 2010) sebagai berikut:

1. **Sistem Akuntansi dan IT Based System**
Melihat kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akruaI, dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akruaI di lingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan IT based system yang lebih rumit.
2. **Komitmen dari pimpinan**
Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya SKPD penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.
3. **Resistensi terhadap perubahan**
Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akruaI dapat berjalan dengan baik.
4. **Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai**
Persoalan ini sangat mendasar mengingat mekanisme perekrutan PNS yang masih terpusat, meskipun kewenangan untuk pelaksanaan program peningkatan kualitas SDM ada di pemerintah daerah. Apalagi dengan adanya pemekaran daerah, hal ini menjadi persoalan tersendiri ketika SDM yang terbatas kemudian harus dibagi lagi.
5. **Struktur organisasi**
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Pemerintah Daerah harus menyusun struktur organisasi baru dimana ruang untuk akuntansi semakin terbuka. Namun, rendahnya kualitas dan kuantitas SDM akuntansi menjadi persoalan yang semakin berat.
6. **Aspek regulasi**
Ketidakkonsistenan dalam penerbitan peraturan perundangan terkait akuntansi pemerintahan mengakibatkan Pemerintah Daerah kurang serius untuk melaksanakan akuntansi. Pemerintah Daerah merasa dijadikan objek karena beberapa

petunjuk teknis atau pedoman pelaksanaan tidak sejalan.

Menurut Widjajarso (2008), penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya (*cost*) pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas.

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan.

Menurut Halim dalam Selvina, dkk (2015), menjelaskan Akuntansi pemerintahan memiliki kaitan yang erat dengan penarapan dan perlakuan akuntansi pada *domain publik*. Domain publik memiliki wilayah yang luas dan kompleks di bandingkan dengan sektor swasta. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan pemerintahan, perusahaan milik negara dan daerah, yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, lembaga swadya masyarakat, dan organisasi nirlaba lainnya.

Menurut Siregar (2015), walaupun memiliki kelebihan dan manfaat yang dapat diperoleh atas penerapan basis akrual, baik bagi pengguna laporan (*user*) maupun bagi pemerintah sebagai penyedia laporan keuangan, akuntansi pemerintahan berbasis akrual juga memiliki kelemahan, kelemahan tersebut terletak pada berbagai tantangan untuk dapat menerapkannya. Ada beberapa factor yang merupakan tantangan penerapan yang perlu diatasi, yaitu sumber daya manusia, teknologi informasi, pendanaan, resistensi, dan komitmen pimpinan.

Yamamoto dalam Mardiasmo (2009), Perubahan dari *cash basis* menjadi *accrual basis* memang tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Perlu analisis yang mendalam

dan kompleks terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhinya, salah satunya adalah faktor sosiologis masyarakat negara tersebut.

Keberhasilan perubahan akuntansi pemerintahan yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel memerlukan upaya dan kerja sama dari berbagai pihak. Jika penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual saja masih banyak menghadapi hambatan, apalagi jika pemerintah akan menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif, dimana sebuah penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian adalah melalui metode kuesioner dan wawancara. Sedangkan, Populasi yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah satuan kerjasatuan kerja dalam Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah PPK-SKPD dan Staf Bagian Keuangan yang ada di dalam Setiap SKPD sebanyak 80 responden. Peneliti juga menggunakan informan sebagai narasumber penelitian, informan dalam penelitian ini adalah 1 (Satu) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan, 1 (Satu) Orang Kepala Dinas DPPKAD, 1 (Satu) Orang Kasi Akuntansi di DPPKAD dan 2 (Dua) Orang Staf Keuangan dan Pelaporan DPPKAD di Kabupaten Kepulauan Meranti.

HASIL**Parameter Untuk Kesiapan Komitmen Kepala Daerah dan DPRD Dalam Penerapan SAP Berbasis Akrua**

Kesimpulan untuk variabel kesiapan komitmen dalam penerapan SAP Berbasis Akrua dengan menggunakan skala likert, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Total Jawaban Responden} &= \\ 299+292+287+291+284+290+288+298 &= \\ 2329 \end{aligned}$$

$$\text{Nilai Tertinggi} = 8 \times 73 \times 5 = 2920$$

$$\text{Nilai Tertinggi} = 8 \times 73 \times 1 = 584$$

$$I = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Banyak Kelas}}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{2920 - 584}{5} \\ &= 467,2 \end{aligned}$$

Dengan demikian digambarkan interval sebagai berikut:

Gambar a : Interval Parameter untuk Kesiapan Komitmen Kepala Daerah dan DPRD dalam Penerapan SAP Berbasis Akrua

STS	TS	C S	S	SS
584	1051	1518	1986	2453
				2920

Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam Parameter untuk kesiapan komitmen Kepala Daerah dan DPRD dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrua adalah sebanyak 2329 skor.

Dari hasil tersebut, jumlah skor berada pada rata-rata interval 1986 dan 2453 yakni dalam kondisi “ SIAP ” dengan skor 2329 jawaban. Maka dapat disimpulkan bahwa parameter kesiapan komitmen kepala daerah dan DPRD mempunyai rasa tanggung jawab, mempunyai kesiapan dalam keberanian bersikap, kesiapan dukungan dalam pelaksanaannya baik berupa kebijakan dan sistem akuntansi pemerintahan. Komitmen juga

menjadi landasan kuat untuk keberhasilan penerapan melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrua, Khusus Pemerintah Daerah Meranti dari sisi komitmen telah mendapat dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan tentang pelaksanaan akrua pada APBD Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2014 dan Tahun 2015. Dan hal diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terbaru yakni Peraturan Bupati No 45 tanggal 23 November 2015 tentang Kebijakan Akuntansi berbasis Akrua; dan Peraturan Bupati No 46 tanggal 23 November 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD), sehingga menjadikan komitmen Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua semakin matang.

Parameter Untuk Kesiapan Sumber Daya Manusia Dalam Penerapan SAP Berbasis Akrua

Kesimpulan untuk variabel kesiapan sumber daya manusia dalam penerapan SAP Berbasis Akrua, dengan menggunakan skala likert, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Total Jawaban Responden} &= 238 + \\ 228+231+237+240+232+232+232 +238 &= \\ 2108 \end{aligned}$$

$$\text{Nilai Tertinggi} = 9 \times 73 \times 5 = 3285$$

$$\text{Nilai Tertinggi} = 9 \times 73 \times 1 = 657$$

$$I = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Banyak Kelas}}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{3285 - 657}{5} \\ &= 525,6 \end{aligned}$$

Dengan demikian digambarkan interval sebagai berikut:

Gambar b : Interval Parameter untuk Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam Penerapan SAP Berbasis Akrua

STS	TS	CS	S	SS
657	1183	1708	2233	2759
				3285

Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam Parameter untuk ke- siapan SDM dalam penerapan SAP Berbasis Akrua adalah sebanyak 2108 skor Jawa- ban.

Dari hasil tersebut, jumlah skor be- rada pada rata- rata interval 1708 dan 2233. Maka dapat diketahui bahwa kesiapan SDM pada Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penerapan SAP Berbasis Akrua dalam kondisi yang “Cukup Siap”. Dimana sumber daya manusia merupakan integritas sebagai sarana pendukung optimasi bidang tugas yang membutuhkan perhatian untuk melak- sanakan segala aktivitas, yang memiliki alasan serta harapan, membutuhkan adanya tupoksi yang jelas dan dorongan untuk berke- rja, yang membutuhkan pendistribusian SDM disetiap SKPD yang sesuai dengan bidang ilmu dan latar belakang pendidikan. Jika dilihat dari paramenter kesipan dapat disimpulkan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Kepulauan Meranti masih dalam rata-rata interval “ CUKUP SIAP ” ini dikarenakan masih minimnya pegawai yang berlatar belakang akuntansi sehingga masih membutuhkan adanya pelatihan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dae- rah. Dengan pelatihan tersebut diharapkan sumber daya manusia di Pemerintah Kabu- paten Kepulauan Meranti memiliki kemauan dan pemahaman yang baik sehingga dapat bekerja keras, disiplin serta memiliki loyalitas yang tinggi serta dapat memahami ten- tang peraturan pengelolaan keuangan dae- rah yang telah di amanatkan oleh undang – undang khususnya dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

Parameter Untuk Kesiapan Sarana Prasarana Dalam Penerapan SAP Ber- basis Akrua

Kesimpulan untuk variabel kesiapan sarana prasarana dalam penerapan SAP Ber- basis Akrua dengan menggunakan skala likert, sebagai berikut:

$$\text{Total Jawaban Responden} = 249 + 262 + 267 + 269 + 281 = 1328$$

$$\text{Nilai Tertinggi} = 5 \times 73 \times 5 = 1825$$

$$\text{Nilai Tertinggi} = 5 \times 73 \times 1 = 365$$

$$I = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Banyak Kelas}}$$

$$I = \frac{1825 - 365}{5} = 292$$

Dengan demikian digambarkan interval se- bagai berikut:

Gambar c : Interval Parameter untuk Kesipan Sarana Prasarana dalam Pene- rapan SAP Berbasis Akrua

STS	TS	CS	S	SS
365	657	949	1241	1533
				1825

Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam Parameter un- tuk kesiapan Sarana Prasarana dalam pelak- sanaan SAP Berbasis Akrua adalah seban- yak 1328 skor jawaban .

Dari hasil tersebut, jumlah skor be- rada pada rata- rata interval antara 1241 dan 1533. Maka dapat diketahui bahwa dalam kesiapan Infrastruktural dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrua di Pemerintah Kabu- paten Kepulauan Meranti berada di kategori “ SIAP” , baik berupa kesiapan sarana ru- angan yang memadai untuk operasi Standar Akuntansi Pemerintahan, kesiapan du- kungan sarana prasarana perangkat lunak, kesiapan dukungan sarana prasarana basis data pendukung operasionalisasi, kesiapan administrasi yang memadai dan mempunyai

kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan anggaran.

Parameter Untuk Kesiapan Standar Operasional Prosedure (SOP) Dalam Penerapan SAP Berbasis Akrual

Kesimpulan untuk variabel kesiapan standar operasional prosedure (SOP) dalam Penerapan SAP Berbasis Akrual dengan menggunakan skala likert, sebagai berikut:

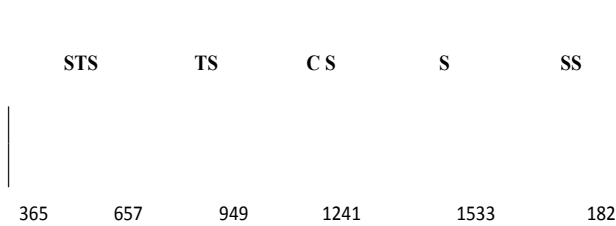
$$\begin{aligned} \text{Total Jawaban Responden} &= 290 + 301 + 291 + 282 + 291 = 1455 \\ \text{Nilai Tertinggi} &= 5 \times 73 \times 5 = 1825 \\ \text{Nilai Tertinggi} &= 5 \times 73 \times 1 = 365 \end{aligned}$$

$$I = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Banyak Kelas}}$$

$$I = \frac{1825 - 365}{5} = 292$$

Dengan demikian digambarkan interval sebagai berikut:

Gambar d: Interval Parameter untuk Kesiapan Standar Operasional Prosedure (SOP) dalam Penerapan SAP Berbasis Akrual



Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam Parameter untuk kesiapan Standar Operasional Procedure (SOP) dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrual adalah sebanyak 1455 skor Jawaban.

Dari hasil tersebut, jumlah skor berada pada rata-rata interval antara 1241 dan 1533. Maka dapat diketahui bahwa dalam kesiapan Standar Operasional Prosedure (SOP) dalam penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berada di keadaan yang “SIAP”, berupa kesiapan yang didukung oleh Peraturan Daerah yakni Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2015 Tentang Standar Operasio-

anl Prosedur Pelaksanaan Akuntansi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Parameter Untuk Kesiapan Sistem Informasi Dalam Penerapan SAP Berbasis Akrual

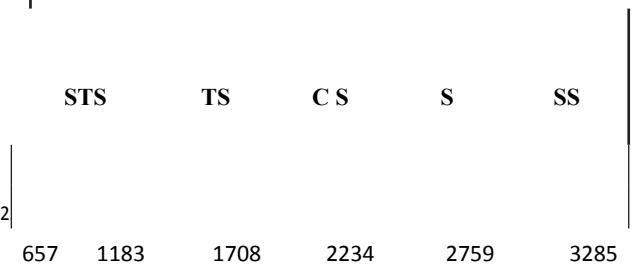
Kesimpulan untuk variabel kesiapan sistem informasi dalam penerapan SAP Berbasis Akrual dengan menggunakan skala likert, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Total Jawaban Responden} &= 263 + 279 + 279 + 255 + 279 + 273 + 264 + 267 + 250 = 2409 \\ \text{Nilai Tertinggi} &= 9 \times 73 \times 5 = 3285 \\ \text{Nilai Tertinggi} &= 9 \times 73 \times 1 = 657 \end{aligned}$$

$$I = \frac{3285 - 657}{5} = 525,6$$

Dengan demikian digambarkan interval sebagai berikut:

Gambar e : Interval Parameter untuk Kesiapan Sistem Informasi dalam Penerapan SAP Berbasis Akrual



Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam Parameter untuk kesiapan Sistem Informasi dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrual adalah sebanyak 2409 skor Jawaban .

Dari hasil tersebut, jumlah skor berada pada rata-rata interval antara 2234 dan 2759. Maka dapat diketahui bahwa dalam kesiapan sistem informasi dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berada di keadaan yang “SIAP” baik berupa kesiapan yang didukung oleh system mekanisme penyelenggaraan SAP Berbasis Akrual dalam

bidang keuangan, kesiapan didukung oleh sistem manajemen informasi yang dilaksanakan secara cermat, tepat akurat, kesiapan didukung oleh system perangkat lunak SAP yang (fleksibel) didukung oleh pelatihan peningkatan yang berkualitas.

Pada Tahun 2014 telah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan Aplikasi SIPKD Akrua. Kemudian, pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengantikannya dengan SIMDA 2.7, ini merupakan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah (BPKP), walaupun *output* yang dihasilkan aplikasi SIPKD atau SIMDA sampai saat ini hanyalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sedangkan komponen keuangan lainnya masih disajikan dalam bentuk manual / excel yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi yang telah di rekrut oleh Pemerintah Daerah untuk menyusun laporan keuangan SKPD maupun BUD. Hal ini, dikarenakan masih minimnya sumber daya manusia (pegawai) yang handal dan kompeten dibidangnya dan masih adanya pelatihan Optimalisasi Aplikasi SIMDA 2.7.

Pelaporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu entitas pelaporan, dalam menyajikan laporan keuangannya tahun 2009 s.d 2014 masih berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 berbasis CTA (*Cash Toward Acrual*) dan/atau Berbasis Kas Menuju Akrua. Dimana PP No.24 Tahun 2005 Lampiran II masih memperbolehkan penggunaan CTA (*Cash Toward Acrual*). Penggunaan basis akuntansi berbasis Akrua di Kabupaten Kepulauan Meranti dilaksanakan sepenuhnya Pada Tahun 2015. Pada Tahun 2015, Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyajikan 7 (Tujuh) Laporan Keuangan yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Equitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas

Laporan Keuangan (CALK). Pada dasarnya basis akuntansi hanya dikenal dua, yaitu Basis Kas dan Basis Akrua. Secara teori sendiri tidak ada teori untuk CTA. Disebut CTA dan/atau Kas Menuju Akrua karena untuk realisasi anggaran masih menggunakan basis kas sedangkan untuk neraca menggunakan basis akrua.

PEMBAHASAN

Dilihat dari hasil penelitian dan data telah diperoleh, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah tiga kali berturut-turut mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Opini audit dari BPK berupa WDP (sejak tahun 2009 sampai dengan 2010) dan WTP (dari tahun 2012 sampai dengan 2015) menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki nilai lebih di mata publik atas kualitas kinerja aparaturnya, transparansi dan kredibilitas laporan keuangannya. Dilihat dari sisi pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAP, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu panutan untuk daerah lain.

Dalam rangka implementasi SAP berbasis akrua, pemerintah daerah telah mempunyai anggaran terkait pelatihan dan pengembangan SDM (sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, seminar). Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2014 menganggarkan program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan antara lain :

1. Bimbingan Teknis Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua dengan anggaran Rp 893.650.000,00
2. Sosialisasi Kebijakan Akuntansi dengan anggaran Rp199.579.000,00
3. Pendidikan Dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAP Berbasis Akrua dengan anggaran Rp272.559.000,00

Namun pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum menganggarkan terkait pelatihan dan pengem-

bangun SDM. Pada Tahun 2014 Dalam pengembangan aplikasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menganggarkan Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan antara lain :

1. Pengembangan Aplikasi SIPKD anggaran Rp1.006.997.500,00
2. Pelaksanaan Aplikasi SIPKD anggaran Rp980.049.189,00

Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga menganggarkan Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan Pelaksanaan, Pengembangan Dan Pendampingan Aplikasi SIPKD dengan anggaran Rp 993.365.000,00

Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti telah mempersiapkan penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akruwal dengan matang sejak tahun 2014 sampai dengan 2015 baik dari sisi komitmen, anggaran dan sistem keuangan hal ini juga di dukung dari Penghargaan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI selama 3 (tiga) kali berturut turut.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti

Pernyataan yang mendukung komitmen pemerintah kota Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penerapan standar akuntansi akrual ini disampaikan key Informan 1 yakni Bapak. Iqaruddin selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyatakan tentang komitmen pemerintah daerah dalam penerapan Akuntansi Berbasis Akruwal yang menyatakan bahwa : “ *Persiapannya kita sudah matang sejak tahun 2014, namun persiapan yang lebih intens itu Tahun 2015 ini, karena ketika keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Berbasis Akruwal agar semua daerah menyusun laporan keuangannya dengan Berbasis Akruwal dan mewajibkan membuat kebijakan akuntansi paling lambat 31 Mei 2014 dan itupun sudah dilakukan oleh Kabupaten kami, ini*

dapat dilihat dari Peraturan Bupati No. 45 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akruwal dan Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD). Dengan peraturan ini menjadi dasar dalam komitmen Pemda dalam pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akruwal”.

Hal ini sejalan dengan International Federation of Accountants (IFAC) No. 01 dalam Gabriella dan Kurniawan (2014) menyatakan perubahan fundamental sistem pelaporan dan akuntansi dari *cash basis* menjadi *accrual basis* perlu dikelola dan dipersiapkan dengan baik. IFAC mensyaratkan agar proses transfer tersebut berjalan dengan lancar perlu persiapan memadai yang meliputi adanya mandat dari peraturan perundang-undangan yang jelas, komitmen politik, komitmen dari pemerintah pusat dan daerah, sumber data manusia yang memadai, kemampuan teknologi dan sistem informasi yang memadai dan wewenang dalam melakukan perubahan yang didukung oleh legislatif.

Sumber Daya Manusia

Dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah mempunyai anggaran terkait pelatihan dan pengembangan SDM (sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, seminar). Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah kas basis menuju basis akrual akan membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun itu. Perubahan menuju ke arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pertanyaan pro-kontra mengenai siap dan tidak siapakah pemerintah daerah mengimplementasikan SAP berbasis akrual ini akan terus timbul. Hal paling baku muncul terkait sumber daya manusia pemerintah. Sumber daya manusia di pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai kurang memadai, ini dikarenakan SDM di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang di nilai tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan dan hal tersebut menjadi masalah

klasik dalam pengelolaan keuangan.

Sarana Prasarana dan Standar Operasional Prosedur

Pernyataan yang mendukung sarana prasarana dan standar operasional prosedur (SOP) di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penerapan basis akuntansi dapat berupa kesiapan sarana ruangan yang memadai untuk operasi SAP, kesiapan dukungan sarana prasarana perangkat lunak, kesiapan dukungan sarana prasarana basis data pendukung operasionalisasi, kesiapan administrasi yang memadai dan mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan anggaran. Walaupun belum semua terpenuhi secara maksimal dukungan tersebut sudah dapat dilihat sejak tahun 2014 baik dari segi ruangan yang cukup layak buat system aplikasi, anggaran yang berkaitan Akuntansi Berbasis Akrua telah disahkan oleh DPRD maupun system aplikasi yang digunakan.

Sistem Informasi

Pada Tahun 2014 telah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan Aplikasi SIPKD Akrua. Kemudian, pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengantikannya dengan SIMDA, ini merupakan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah (BPKP), walaupun *output* yang dihasilkan aplikasi SIPKD atau SIMDA sampai saat ini hanyalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sedangkan komponen keuangan lainnya masih disajikan dalam bentuk manual / excel yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi yang telah di rekrut oleh Pemerintah Daerah untuk menyusun laporan keuangan SKPD maupun BUD. Hal ini, dikarenakan masih minimnya sumber daya manusia (pegawai) yang handal dan kompeten dibidangnya dan masih adanya pelatihan Optimalisasi Aplikasi SIMDA Modul Pembukuan di tahun tersebut.

Kendala Pemerintah Daerah

Adapun kendala yang dihadapi dalam Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua jika dilihat dari 4 sudut pandang kesiapan sebagai berikut :

1. Dari sisi komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah mendapat dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini sejalan dengan jumlah skor yang di peroleh berada di rata-rata interval 1986 dan 2453 yakni dalam kondisi “ SIAP ” dengan skor 2329 jawaban. Maka dapat disimpulkan bahwa parameter kesiapan komitmen kepala daerah dan DPRD mempunyai rasa tanggung jawab, mempunyai kesiapan dalam keberanian bersikap, kesiapan dukungan dalam pelaksanaannya baik berupa kebijakan dan sistem akuntansi pemerintahan.
2. Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) atau Aparatur dalam memahami penerapan Akuntansi Berbasis Akrua. Hal ini dapat dilihat data yang di peroleh peneliti yakni dimana sarjana S 1- akuntansi hanya berjumlah 16 Orang atau 22 % dan pegawai yang berpendidikan sarjana S 1- Ekonomi berjumlah 22 Orang atau 30 %, sedangkan 35 orang atau 48 % berpendidikan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kabupaten Kepulauan Meranti jika dilihat dari latar pendidikan akuntansinya masih sangat minim dan masih kurangnya sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) mengenai pengelolaan keuangan daerah. Jumlah 2108 skor Jawaban memperlihatkan kesiapan SDM pada Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penerapan SAP Berbasis Akrua dalam kondisi yang “Cukup Siap”. Hal ini di dukung dengan perekrutan tenaga akuntan yang berjumlah 40 orang yang ditugaskan di masing-masing SKPD dan BUD dalam membantu proses penyusunan laporan keuangan, ini disebabkan SDM di Pemerintah Kabupaten Meranti yang di nilai masih be-

- lum kompeten dan trampil dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah khususnya akuntansi berbasis akrual.
3. Telah Tersedianya sarana prasarana, baik itu kesiapan dukungan sarana prasarana perangkat lunak, kesiapan dukungan sarana prasarana basis data pendukung operasionalisasi, kesiapan administrasi yang memadai dan mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan anggaran. Hal ini sejalan dengan hasil data yang diperoleh peneliti yakni berada pada rata-rata interval antara 1241 dan 1533 sebanyak 1328 skor jawaban yakni berada di kategori “SIAP”.
 4. Kesiapan sistem informasi dalam penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berada di kondisi “SIAP” yakni 2409 skor Jawaban. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti didukung oleh sistem mekanisme penyelenggaraan SAP Berbasis Akrual dalam bidang keuangan yang di mulai dari proses penjurnalan, buku besar, penyesuaian dan neraca saldo. Kesiapan harus dilaksanakan secara cermat, tepat akurat sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Akuntansi Berbasis Akrual. Ini dikarenakan, Laporan keuangan yang akan dihasilkan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 menjadi bertambah kuantitasnya hingga 7 laporan yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Sistem perangkat lunak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni berupa Aplikasi SIMDA, dimana *output* yang dihasilkan aplikasi tersebut sampai saat ini hanyalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sedangkan komponen keuangan lainnya masih disajikan dalam bentuk manual / excel yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi yang telah di rekrut oleh Pemerintah Daerah untuk

menyusun laporan keuangan SKPD maupun BUD. Hal ini, dikarenakan masih minimnya sumber daya manusia (pegawai) yang handal dan kompeten dibidangnya dan masih adanya pelatihan Optimalisasi Aplikasi SIMDA Modul Pembukuan di tahun tersebut.

Rencana Strategis Pemerintah

Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual antara lain;

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyusun Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
2. Mengumpulkan aparatur-aparatur negara (SDM) yang kompeten dan melakukan pengembangan atas pemahaman kepada para pengelola keuangan pemerintah melalui pelatihan atau bimbingan teknis mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
3. Kabupaten Kepulauan Meranti terus mengakomodir sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual yakni aplikasi SIMDA 2.7
4. Menempatkan pegawai pada posisi atau lingkup tugas yang sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat lebih memahami dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya
5. Melakukan perekrutan atau penerimaan pegawai untuk tahun berikutnya dengan mempertimbangkan tingkat dan latar belakang pendidikan khususnya yang berkaitan dengan lingkup tugas pengelolaan keuangan daerah

SIMPULAN

Kesiapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilihat dari parameter kesiapan Komitmen, Sistem informasi, Sarana prasarana dan Standar Operasional Prosedur (SOP) menunjukkan interval rata-rata “SIAP”, sedangkan Sumber Daya Manusia menunjukkan parameter interval rata-rata yang “Cukup Siap”. Hal ini dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM)

yang berlatar belakang akuntansi masih sangat kurang, sehingga menjadi bantu sandungan bagi pemda dalam memahami mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual khususnya pada bagian keuangan.

Kendala sistem informasi dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) antara lain; untuk tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti masih menggunakan kas basis dalam penyusunan laporan keuangannya dengan menggunakan system aplikasi SIPKD untuk perangkat lunaknya, namun untuk Tahun 2015 sesuai dengan amanat Pemerintah Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 penyusunan laporan keuangan sudah menggunakan SIMDA 2.7 berbasis akrual untuk perangkat lunaknya. Ini menunjukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus bekeja ekstra keras untuk melakukan pelatihan kepada para aparatur negara (SDM) agar dapat memahami dan menyusun Laporan Keuangannya Berbasis Akrual secara penuh.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati No 45 tanggal 23 November 2015 tentang Kebijakan Akuntansi berbasis Akrual; dan Peraturan Bupati No 46 tanggal 23 November 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Kabupaten Kepulauan Meranti ini menjadikan komitmen dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual.

DAFTAR RUJUKAN

- Mardiasmo.,2009, Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta Penerbit Andi.
- Selvina Sitorus, dkk, 2015, Analisis Kesediaan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan PP. No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon.
- Widjajarso., Bambang, 2008. Penerapan Basis Akrual Pada Akuntansi Pemerintah Indonesia:Sebuah Kajian Pendahuluan www.wikipedia.org diunduh tanggal 12 Januari 2014.